

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penindakan dan faktor-faktor penghambatnya, serta penerapan penindakan yang seharusnya, terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem E-Tilang dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini adalah: 1) Penerapan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem E-Tilang dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti bahwa E-Tilang diberlakukan untuk melakukan penertiban dalam berlalu lintas. jika dalam Tilang konvensional pelanggar akan diberhentikan oleh petugas dan diberi surat Tilang, namun dalam E-Tilang ada kemungkinan pelanggar tidak mengetahui jika telah melakukan pelanggaran. 2) Faktor penghambat dalam penerapan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem E-Tilang dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti, yaitu Satlantas belum memiliki kamera tersendiri sehingga dalam penerapannya masih menginduk kepada kamera milik Dishub Kota Semarang. Data Regident harus menggunakan server yang terkoneksi ke Korlantas Mabes dan dalam setiap penindakan harus berkoordinasi ke Direktorat Lalu lintas Polda Jateng yang memiliki jaringan tersebut. Belum terdukungnya anggaran untuk pengiriman via Pos Alamat yang tertera di STNK belum sepenuhnya sesuai dengan kepemilikan. 3) Penerapan penindakan yang seharusnya terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem E-Tilang dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti yaitu dengan menerapkan asas *vicarious liability* dimana suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Artinya bahwa saat ini penerapan E-Tilang dan E-Tilang belum dapat dikenakan kepada pemilik kendaraan asal, meskipun kendaraan belum dibaliknama, namun masih dikenakan kepada yang memiliki berdasarkan akte jual beli. Hal tersebut dikarenakan Masyarakat pemilik kendaraan bermotor, baik mobil dan sepeda motor, belum seluruhnya melakukan proses balik nama.

Kata Kunci: Penindakan, Pelanggar Lalu Lintas, E-Tilang, Rekaman CCTV, Barang Bukti

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the application of prosecution and its inhibiting factors, as well as the application of actions that should be, against traffic violators through the E-ticketing system with CCTV footage as evidence

The approach method used in this research is empirical juridical approach. The research specification is analytical descriptive. In this study the analysis used is qualitative analysis.

The results in this study are: 1) Application of measures against traffic violators through the E-ticketing system with CCTV footage as evidence that the E-ticketing is applied to control the traffic. if in a conventional ticket the violator will be dismissed by the officer and given a ticket, but in the E-ticket there is a possibility that the offender does not know if he has committed the violation. 2) The inhibiting factor in the application of repression of traffic violators through the E-ticketing system with CCTV footage as evidence, namely the traffic police does not have its own camera so that in its application it still has the camera belonging to the Semarang City Transportation Agency. Regident data must use a server connected to the National Police Headquarters and in each action must coordinate with the Directorate of Traffic in the Central Java Regional Police who owns the network. The budget for sending via Post Address has not been supported in the STNK not yet in accordance with ownership. 3) Applying the appropriate measures for traffic violators through the E-ticketing system with CCTV footage as evidence that is by applying the principle of vicarious liability in which a criminal liability is imposed on someone for someone else's actions (the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another). This means that currently the application of E-TLE and E-ticketing cannot yet be imposed on the owner of the original vehicle, even though the vehicle has not been reversed, but is still imposed on those who have it based on the sale and purchase certificate. That is because the community who own motorized vehicles, both cars and motorbikes, have not yet fully gone through the process of renaming.

Keywords: *Enforcement, Traffic Violators, E-ticketing, CCTV Records, Evidence*